

**PERBANDINGAN PENERIMAAN DAERAH
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH**
Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari



S k r i p s i

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

STEVENT MIKA

NIM : 992114205

NIRM : 99005112130320205

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2005**

**PERBANDINGAN PENERIMAAN DAERAH
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH**
Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari

S k r i p s i

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

STEVENT MIKA

NIM : 992114205

NIRM : 99005112130320205

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2005**

SKRIPSI

**PERBANDINGAN PENERIMAAN DAERAH
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH**
Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari

Oleh:
STEVENT MIKA
NIM : 992114205
NIRM : 99005112130320205

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E.,M.Si.

tanggal : 28 Juli 2005

Pembimbing II



Drs. G. Anto Listianto, MSA.,Akt.

tanggal : 4 Oktober 2005

SKRIPSI

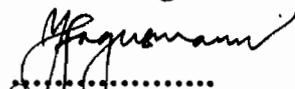
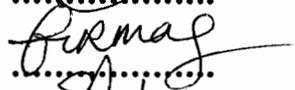
**PERBANDINGAN PENERIMAAN DAERAH
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH**
Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

**STEVENT MIKA
NIM : 992114205
NIRM : 99005112130320205**

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 22 Nopember 2005
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E.,M.Si.	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E.,M.Si.	
Anggota	Drs. G. Anto Listianto, MSA.,Akt.	
Anggota	D. Desembriarto, S.E.,M.Si.	

Yogyakarta, 30 Nopember 2005
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,


Drs. Alex Kahulantum, M.S.

PERSEMBAHAN

“ Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita “

(Efesus 3:20)

“ Kita perlu mengingat-ingat bahwa kita tidaklah tak berdaya. Selalu ada yang bisa kita lakukan “

(Carla Gorrell)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- o Tuhan Yesus Kristus*
- o Keluargaku*
- o Teman-temanku*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 Nopember 2005

Penulis



Stevent Mika

ABSTRAK

PERBANDINGAN PENERIMAAN DAERAH SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari

STEVENT MIKA
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2005

Penelitian ini bertujuan : 1). Untuk mengetahui perbandingan perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003 – 2004). 2). Untuk mengetahui perbandingan persentase anggaran belanja pembangunan Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003 – 2004). 3). Untuk mengetahui perbandingan efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003 – 2004).

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 1) Analisis horizontal yaitu analisis data dengan cara melakukan perbandingan perkembangan penerimaan daerah sebelum dan setelah pemekaran wilayah. 2). Menghitung persentase anggaran belanja pembangunan terhadap total APBD sebelum dan setelah pemekaran wilayah. 3). Analisis rasio efektivitas anggaran belanja pembangunan untuk mengetahui tingkat efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran wilayah meningkat sebesar 6 % sedangkan setelah pemekaran wilayah meningkat hanya sebesar 1 %, kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan daerah setelah pemekaran wilayah menurun. 2). Besarnya persentase anggaran belanja pembangunan terhadap APBD sebelum pemekaran wilayah adalah 50,42 % dan 44,72 % sedangkan persentase anggaran belanja pembangunan setelah pemekaran wilayah adalah 44,19 % dan 29,41 %. Ini menunjukkan bahwa persentase anggaran belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah lebih besar di bandingkan dengan setelah pemekaran wilayah. 3). Efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah menurun yaitu dari 74,79 % menjadi 65,13 % sedangkan efektivitas anggaran belanja pembangunan setelah pemekaran wilayah meningkat yaitu dari 76,44 % menjadi 79,37 %.

APSTRAC

THE COMPARISON OF REGIONAL INCOME BEFORE AND AFTER THE TERRITORIAL EXPANSION A Case Study in Regional Government of Manokwari Regency

STEVENT MIKA

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2005

This research aimed at: 1) knowing the comparison of regional income development of Manokwari regency before the territorial expansion (period of 2001 – 2002) and after the expansion (period of 2003 – 2004). 2) knowing the comparison of percentage of development budget of Manokwari regency before the territorial expansion (period of 2001 - 2002) and after the expansion (period of 2003 – 2004). 3) knowing the development budget effectivity of Manokwari regency before the territorial expansion (period of 2001 – 2002) and after the expansion (period of 2003 – 2004).

The data analysis techniques used in this research were: 1) horizontal analysis, that was data analysis by performing a comparison of regional income development before and after the territorial expansion; 2) Computing the percentage of development budget over the regional budget (APBD) before and after the territorial expansion; 3) analysis of effectivity ratio of regional development budget in order to know the effectivity of development budget before and after the territorial expansion.

The result of the research suggested that 1) The development of regional income of Manokwari regency before the regional expansion increase by 6 % while after the expansion the income only increased by 1 %, this condition suggested that the income after the expansion was decrease. 2) The percentages of regional development budget over the APBD before the expansion was 50,42 % and 44,71 %; while after the expansion it were 44,19 % and 29,4 1%. These suggested that the percentage budget before the expansion was higher than the one after the expansion. 3) The effectivity of the development budget before the territorial expansion decreased from 74,79 % to 65,13 %, whereas the development budget effectivity after the territorial expansion increased from 76,44 % to 79,73 %.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi berjudul “ PERBANDINGAN PENERIMAAN DAERAH SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH “ ini adalah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan kerjasama dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih pada :

1. Yesus Kristus atas berkat dan kuasaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Alex Kahulantum, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.. selaku Ketua Program Studi Akuntansi
4. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. G. Anto Listianto, MSA.,Akt. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Sanata Dharma yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Drs. Anton Lesnussa, MM. yang telah memberikan izin penelitian di Kantor PEMDA Kab. Manokwari.
8. Mama dan Papa tercinta untuk doa dan segala pengorbanan yang telah diberikan.
9. Adik-adikku atas segala dukungan dan bantuannya.
10. Teman-teman Akt.99 kelas C, kelas MPT ibu Firma & KKP V kelompok 12.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun kami terima dengan hati yang terbuka.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang menggunakannya.

Yogyakarta, 30 Nopember 2005

Penulis



Stevent Mika

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KESALIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pemekaran Wilayah	6
1. Pengertian Pemekaran Wilayah	6
2. Tujuan Pemekaran Wilayah	6
3. Syarat-syarat Pemekaran Wilayah	7
4. Dampak Pemekaran Wilayah	9
B. Sumber-sumber Penerimaan Daerah	10
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
2. Dana Perimbangan	12

3. Pinjaman Daerah	13
4. Lain-lain Penerimaan Yang Sah	13
C. Pengeluaran Daerah	13
1. Belanja Rutin	14
2. Belanja Pembangunan	14
3. Efektivitas	16

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	17
B. Tempat dan waktu Penelitian	17
C. Subyek dan Obyek Penelitian	17
D. Teknik Pengumpulan Data	17
E. Teknik Analisis Data	18

BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

A. Keadaan geografis	20
B. Keadaan Penduduk	20
C. Sosial	22
D. Kondisi Wilayah	23
E. Pemerintahan	27

BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data	28
1. Persentase Perkembangan Penerimaan Daerah Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004)	28
2. Persentase Anggaran Belanja Pembangunan Terhadap APBD Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004)	32
3. Persentase Efektivitas Anggaran Belanja Pembangunan Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran	

Wilayah (T.A. 2003 – 2004)	34
B. Pembahasan	52
1. Perbandingan Perkembangan Penerimaan Daerah Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004)	52
2. Perbandingan Persentase Anggaran Belanja Pembangunan Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004)	54
3. Perbandingan Efektivitas Anggaran Belanja Pembangunan Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004)	56
 BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Keterbatasan	60
C. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	 62
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kriteria Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19
Tabel 5.1. Data Penerimaan Daerah Sebelum Pemekaran Wilayah T.A. 2001 – 2002	29
Tabel 5.2. Data Penerimaan Daerah Setelah Pemekaran Wilayah T.A. 2003 – 2004	31
Tabel 5.3. Data Anggaran Belanja Pembangunan Pada Masing-masing Sektor T.A. 2001 – 2004	33
Tabel 5.4. Data Realisasi dan Target Anggaran Belanja Pembangunan Masing-masing Sektor T.A. 2001	35
Tabel 5.5. Data Realisasi Dan Target Anggaran Belanja Pembangunan Masing-masing Sektor T.A. 2002	39
Tabel 5.6. Data Realisasi dan Target Anggaran Belanja Pembangunan Masing-masing Sektor T.A. 2003	43
Tabel 5.7. Data Realisasi Dan Target Anggaran Belanja Pembangunan Masing-masing Sektor T.A. 2004	48
Tabel 5.8. Perbandingan Perkembangan Penerimaan Daerah Sebelum Pemekaran Wilayah Dan Setelah Pemekaran Wilayah	52
Tabel 5.9. Perbandingan Persentase Anggaran Belanja Pembangunan Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah	55
Tabel 5.10 Perbandingan Efektivitas Anggaran Belanja Pembangunan Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Masing-masing Sektor	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan rakyat secara keseluruhan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, terutama bagi daerah yang sangat luas wilayah pemerintahannya yang memerlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pemerataan pembangunan, perkembangan dan pengembangan daerah serta kesejahteraan masyarakat seperti kebijakan pemekaran wilayah pada pemerintahan daerah Propinsi Papua dan khususnya di Kabupaten Manokwari.

Pembahasan tentang pembagian wilayah Propinsi Papua menjadi tiga wilayah propinsi dan pembentukan kabupaten-kabupaten baru sudah dimulai sejak lama. Pada saat pembahasan tersebut muncul beberapa pendapat yang menginginkan pemekaran segera dilakukan pemerintah pusat agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan propinsi dan kabupaten di Papua bisa berjalan dengan lancar mengingat luasnya wilayah yang sangat tidak memungkinkan dipimpin oleh seorang gubernur atau bupati sebagai kepala daerah. Di tahun 2000 dan tahun 2003 dilakukan pemekaran Propinsi Papua dan pemekaran kabupaten dengan maksud untuk lebih memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa.

Peningkatan pelayanan aparat pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya untuk pengembangan sumberdaya manusia dan kesejahteraan hidup masyarakat, dalam Undang-undang No.5 tahun 2000 tentang pemekaran Propinsi Papua dan Undang-undang No.26 tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten di Propinsi Papua memberikan kesempatan dan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan kesehatan masyarakat yang buruk.

Tuntutan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal menuntut pengalokasian dan pendistribusian sumber-sumber pembiayaan secara adil serta penggalian berbagai potensi ekonomi sebagai penerimaan daerah dengan baik, agar daerah pemekaran tersebut mampu melaksanakan pemerintahan dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah daerah harus benar-benar cermat dalam meningkatkan penerimaan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mengenai sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan Yang Sah untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan dilaksanakannya pemekaran wilayah.

Mengingat pentingnya pemekaran wilayah ini khususnya pemekaran wilayah di Kabupaten Manokwari, maka akan berdampak bagi daerah tersebut

terutama yang berkaitan dengan penerimaan daerah yang akan diterima, karena dengan luas wilayah dan potensi penerimaan dari berbagai sektor yang dimiliki semakin kecil. Sehingga sangat diperlukan usaha-usaha yang tepat dan terarah dalam meningkatkan penerimaan daerah untuk dapat digunakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut secara optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003 -2004) ?
2. Bagaimana perbandingan persentase anggaran belanja pembangunan Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003 – 2004) ?
3. Bagaimana perbandingan efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003 -2004) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan perkembangan penerimaan daerah, persentase anggaran belanja pembangunan, dan efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah dan setelah pemekaran wilayah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perbandingan perkembangan penerimaan daerah, belanja pembangunan dan efektivitas belanja pembangunan sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan.

4. Bagi Penulis

Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktek sesungguhnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang dijadikan dasar untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, subyek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Bab ini menjelaskan tentang keadaan geografis, kependudukan, pendidikan, sosial, kondisi alam, potensi ekonomi, dan pemerintahan.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan akhir yang diambil dari masalah yang telah dianalisis dan dibahas, selain itu juga keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemekaran Wilayah

1. Pengertian

Pemekaran wilayah adalah pemecahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah yang sesuai dengan letak dan batas wilayahnya serta mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri daerah itu sehingga diharapkan akan berkembang dimasa mendatang sesuai kebutuhan.

2. Tujuan Pemekaran Wilayah

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pemekaran wilayah (Sumule Agus, 2003:114), adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang ada di daerah.
- c. Meningkatkan kualitas penyebaran dan percepatan pembangunan daerah yang mampu menggalang, membuka peluang yang mengembangkan aktifitas masyarakat dan dunia usaha dalam membangun daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah

Dalam Peraturan Pemerintah R.I. No.129 tahun 2000, pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi merupakan cerminan kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah kabupaten yang dapat dilihat dari penerimaan daerah itu sendiri.

b. Potensi Daerah

Potensi daerah merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari :

1. Lembaga keuangan.
2. Sarana ekonomi.
3. Sarana pendidikan.
4. Sarana kesehatan.
5. Sarana transportasi dan komunikasi.
6. Sarana pariwisata.
7. Ketenagakerjaan.

c. Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat serta kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat dilihat dari :

1. Tempat peribadatan.

2. Tempat kegiatan institusi sosial dan budaya.

3. Sarana olah raga.

d. Sosial Politik

Sosial politik merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat dilihat dari :

1. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

2. Organisasi kemasyarakatan.

e. Jumlah Penduduk dan Luas Daerah

Jumlah penduduk dan luas daerah lebih ditekankan pada jumlah tertentu penduduk serta luas daerah tersebut.

f. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah

Merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah yang dapat dilihat dari :

1. Keamanan dan ketertiban.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

3. Rentang kendali.

4. Propinsi yang akan dimekar minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan atau Kota.

5. Kabupaten yang akan dimekar minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan.

6. Kota yang akan dimekar minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan.

4. Dampak Pelaksanaan Pemekaran Wilayah

Upaya pemekaran wilayah merupakan suatu langkah mempercepat dinamika dan ekonomi masyarakat di daerah yang memiliki wilayah pemerintahan yang sangat luas. Dampak pemekaran wilayah, menurut Toto Suryaningtyas. 2003 :

“ Pemekaran wilayah dapat lebih membantu aparat pemerintah daerah dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat bahkan akan berdampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan hidup masyarakat. “

Bahkan dalam melihat dampak pemekaran wilayah ini ada 2 aspek utama yang harus ditinjau (JRG Djopari; 2003) yaitu :

a. Aspek Pemerintahan

Dengan wilayah yang semakin kecil dan pendek maka akan lebih meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, selain itu juga pelaksanaan pembangunan dapat menyentuh masyarakat sampai ke daerah-daerah kecil/kampung. Sehingga pemerintah daerah tersebut bisa bekerja dengan baik dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat.

b. Aspek Ekonomi

Daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar, namun belum dapat dikelola dengan baik karena daerah yang harus dijangkau untuk mengelola kekayaan alam ini begitu luas. Maka dengan pemekaran ini eksploitasi kekayaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah setempat dan juga membuka peluang besar bagi investasi modal baik dari dalam maupun luar negeri sehingga

dengan sendirinya akan memacu percepatan dan pemerataan pembangunan.

B. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (Bastian Indra. 2003:83) yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut pajak daerah.

Pajak daerah sendiri merupakan pembayaran iuran oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat I, yang terbagi atas :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB).
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat II, terbagi atas :
 - a. Pajak hotel dan restoran.
 - b. Pajak penerangan jalan.
 - c. Pajak reklame.
 - d. Pajak hiburan.
 - e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya

hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran retribusi tersebut.

Jenis-jenis retribusi daerah yaitu :

- a) Retribusi ijin bangunan.
 - b) Retribusi rumah sakit dan pelayanan kesehatan.
 - c) Retribusi pasar.
 - d) Retribusi parkir.
 - e) Retribusi pemakaian kekayaan alam.
 - f) Retribusi ijin trayek kendaraan penumpang.
 - g) Retribusi ijin pelayanan dan pengendalian.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan adalah merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk perkembangan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah merupakan pendapatan yang diterima daerah diluar pendapatan asli daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Bastian Indra. 2003:84). Dana perimbangan ini meliputi :

- a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan orang pribadi dan penerimaan yang berasal dari SDA.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah merupakan dana yang diberikan kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing-masing daerah.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah merupakan dana yang diberikan kepada daerah yang bersifat untuk membiayai pengeluaran / kegiatan khusus.

3. Pinjaman Daerah

Merupakan salah satu cara bagi daerah untuk lebih meningkatkan pembangunannya. Daerah kabupaten dapat saja melakukan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat berupa pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Lain-lain Penerimaan Yang Sah

Penerimaan ini dirancang untuk menampung semua penerimaan yang tidak termasuk dalam jenis PAD seperti hibah dari daerah maupun negara lain.

C. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Halim Abdul. 2001:242), yang meliputi :

1. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah.

Belanja rutin terdiri dari :

a. Belanja administrasi umum :

- Belanja Pegawai.
- Belanja Barang.
- Belanja Perjalanan Dinas.
- Belanja Pemeliharaan.

b. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. Belanja Pembangunan

Belanja pembangunan adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah.

Belanja pembangunan terdiri dari :

A. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur).

Adapun belanja investasi untuk sektor-sektor pembangunan di daerah adalah meliputi :

- Sektor Industri.
- Sektor Pertanian dan Kehutanan.
- Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.

- Sektor Tenaga Kerja.
- Sektor Perdagangan dan Koperasi.
- Sektor Transportasi.
- Sektor Pertambangan dan Energi.
- Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi.
- Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.
- Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- Sektor Pendudukan dan Keluarga Sejahtera.
- Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Sektor Perumahan dan Pemukiman.
- Sektor Agama.
- Sektor IPTEK.
- Sektor Hukum.
- Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.
- Sektor Politik, Komunikasi dan Media Daerah.
- Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.
- Sektor Bantuan Daerah Bawahan.

B. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

3. Efektivitas

Pengertian efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan efektif bilamana kegiatan yang dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Devas, dkk. (1989; 279-280) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam waktu yang secepat-secepatnya.

Pengertian lain efektivitas (Halim Abdul. 2001:74) adalah merupakan kaitan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya, dimana penyelesaian kegiatannya tepat waktu dan di dalam batas anggaran yang telah tersedia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Manokwari.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 1 bulan.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

b. Bagian Keuangan Pemerintahan Kabupaten Manokwari.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah Penerimaan Daerah dan APBD

T.A. 2001 – 2004 Kabupaten Manokwari.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara menyalin data-data keuangan yang ada.

E. Teknik Analisis Data

1. Untuk mengetahui perbandingan perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Manokwari, digunakan teknik analisis data horizontal yaitu analisis data dengan mengadakan perbandingan perkembangan penerimaan daerah sebelum pemekaran (T.A. 2001-2002) dan setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003-2004). Sehingga dapat diketahui persentase peningkatan atau penurunan penerimaan daerah tersebut.

Analisis data akan ditunjukkan dalam :

- a. Data absolut atau data dalam jumlah rupiah

Data ini diperoleh dari selisih rupiah tiap tahun, dari tahun anggaran yang diperbandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

- b. Kenaikan atau penurunan dalam persentase

Data ini diperoleh dengan membagi jumlah pertambahan atau penurunan dari penerimaan daerah dengan jumlah penerimaan daerah tahun anggaran sebelumnya.

2. Untuk mengetahui perbandingan persentase belanja pembangunan terhadap APBD sebelum dan setelah pemekaran wilayah, digunakan rumus (Mardiasmo. 2004:172) :

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

3. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum dan setelah pemekaran wilayah, digunakan rumus (Munir Dasril, dkk. 2004:49) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Adapun efektivitas, perbandingan diukur dengan kriteria penilaian kinerja anggaran dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Kriteria Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup efektif
60 % - 80 %	Kurang efektif
Kurang dari 60 %	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri no.690.600.327.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

A. Keadaan Geografis

Kabupaten Manokwari terletak di antara 0°15' lintang utara dan 3° 15' lintang selatan, serta 134°45' bujur timur dan 132°35' bujur barat. Kabupaten Manokwari berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Kabupaten Sorong di sebelah barat, Kabupaten Fak-Fak di sebelah selatan, dan Biak Numfor di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Manokwari adalah 12.838 dan secara administratif terdiri dari 17 kecamatan dan 100 kelurahan / desa.

Suhu udara di Kabupaten Manokwari berkisar antara 26,3° Celcius hingga 28,0° Celcius, dengan rata-rata hari hujan 24 hari dan curah hujan 423 mm per bulan. Daerah Kabupaten Manokwari sebagian besar berada di dataran Pulau Irian, terdapat 22 gunung, yang tertinggi gunung umsi 2.950 m dan gunung mamofcu 2.985 m, 21 sungai, dan 8 danau.

Secara umum Kabupaten Manokwari mempunyai topografi perbukitan, dimana 85 % merupakan wilayah yang bergelombang (gunung) dan 25 % merupakan wilayah yang datar.

B. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2002, jumlah penduduk Manokwari tercatat sebanyak 192.046 jiwa yang terdiri dari laki-laki 93.048 jiwa dan perempuan 90.702 jiwa. Jika dibanding dengan jumlah

penduduk tahun sebelumnya 186.300 jiwa, penduduk Manokwari mengalami peningkatan sebanyak 5.746 jiwa.

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Manokwari adalah 5,07 jiwa per km², kecamatan yang terbanyak penduduknya adalah kecamatan Manokwari dengan jumlah 63.068 jiwa sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Ambarbaken dengan jumlah penduduk 2.564 jiwa.

1. Tenaga Kerja

Banyaknya pencari kerja yang terdaftar pada Depnaker Kabupaten Manokwari pada tahun 2002 tercatat sebanyak 523 orang yang terdiri dari 343 orang (65,58 %) pencari kerja laki-laki dan 180 orang (34,42 %) pencari kerja wanita. Bila dilihat dari jenjang pendidikan sebanyak 5 orang yang tidak tamat SD (0,98 %), sebanyak 40 orang yang berpendidikan SLTP (7,65 %), sebanyak 279 orang yang berpendidikan SLTA (53,35 %) sedangkan sebanyak 176 orang yang lulusan Sarajana (33,65 %).

2. Keluarga Berencana

Sebagai upaya dan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga yang ada di Kabupaten Manokwari maka pemerintah daerah melalui dinas kesehatan melakukan kegiatan keluarga berencana di setiap kecamatan.

Sebanyak 2.324 pasangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Manokwari pada tahun 2002, sebagian besar dari pasangan tersebut lebih menyukai atau memilih alat KB berupa suntik yakni sebanyak 1.432 orang

kemudian KB berupa pil sebanyak 574 orang sedangkan alat KB yang relatif kecil penggunaannya adalah Medis Operasi Pria (MOP).

C. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia, kemajuan suatu daerah banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Beberapa faktor utama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana dan prasarannya, pengajar dan keterlibatan anak didik.

Pada jenjang SD, Kabupaten Manokwari pada tahun 2002/2003 memiliki sebanyak 223 dengan jumlah total murid sebanyak 30.224 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16.295 orang dan perempuan sebanyak 13.929 orang sedangkan jumlah guru sebanyak 1.348 guru.

Pada jenjang SLTP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 34 sekolah dengan jumlah total murid sebanyak 7.752 yang terdiri dari murid laki-laki sebanyak 4.298 orang dan murid perempuan sebanyak 3.454 orang sedangkan jumlah guru sebanyak 368 guru.

Untuk jenjang SMU, jumlah sekolah tercatat sebanyak 10 dengan jumlah total murid sebanyak 3.562 yang terdiri dari murid laki-laki sebanyak 1.948 orang dan jumlah murid perempuan sebanyak 1.614 orang sedangkan jumlah guru sebanyak 117 guru. Dan untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK tercatat sebanyak 2 sekolah dengan jumlah total murid sebanyak 1.133 yang terdiri dari murid laki-laki sebanyak 638

orang dan jumlah murid perempuan sebanyak 495 orang sedangkan jumlah guru sebanyak 42 guru.

2. Agama

Komposisi penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Manokwari pada tahun 2002 mencatat sekitar 118.151 orang beragama Kristen, Islam sebanyak 60.306 orang, disusul Katolik sebanyak 21.109 orang. Adapun penduduk yang beragama Hindu dan Budha masing-masing tercatat sebanyak 1.631 orang dan 407 orang.

3. Budaya

Suku asli yang mendiami kabupaten Manokwari adalah suku Arfak, suku Wamesa, suku Simuri, Sebyar, Irarutu dan Numfor Doreri, selain itu terdapat suku pendatang asal Papua seperti suku Serui, Biak, Waropen serta beberapa suku dari luar Papua.

D. Kondisi Wilayah

1. Kekayaan Alam

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Manokwari adalah :

a. Tanah

Terdapat sumber daya lahan potensial dengan kondisi tanah yang sesuai untuk pengembangan komoditas perkebunan bernilai ekonomis seperti kelapa sawit, kelapa dalam, coklat, kopi, dan cengkeh dengan luas budi daya 380.000 ha. Dari luas lahan tersebut, 25 % telah dimanfaatkan oleh investor swasta / nasional dan perkebunan rakyat.

b. Hutan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Manokwari masih berupa kawasan hutan dengan luas hutan 2.396.443 ha (63,22 % dari luas wilayah kabupaten). Berdasarkan fungsinya terdiri dari :

- Hutan Produksi Tetap (484.800 ha).
- Hutan Produksi Terbatas (460.117 ha).
- Hutan Produksi Konversi (581.856 ha).
- Hutan Suaka / Cagar Alam (335.742 ha).
- Hutan Wisata (24.205 ha) dan Hutan Lindung (509.723 ha).

c. Kelautan

Wilayah pesisir pantai dan laut di Kabupaten Manokwari menyimpan potensi sumber daya laut bernilai ekonomis seperti ikan tuna, pelagis, hiu, udang dan kepiting dan juga terdapat 2 unit industri pengelola ikan yaitu industri ikan beku (PT. Inter Galaxi Delta Fisheries) dan industri udang beku (PT. Bintuni Mina Raya Agro).

2. Potensi Ekonomi

Bebearapa potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Manokwari, antara lain :

a. Sektor Pertanian

Usaha pertanian tanaman pangan yang utama di Kabupaten Manokwari adalah umbi-umbian dan merupakan bahan makanan pokok sebagian besar penduduk, hasil produksi sektor ini yang potensial antara lain padi, jagung dan ubi jalar.



Pada tahun 2002 diketahui bahwa luas areal panen padi mencapai 4.203 Ha dan menghasilkan produksi padi sebanyak 15.841 ton, luas areal panen pada jagung mencapai 1.963 Ha dan menghasilkan produksi jagung sebanyak 3.883 ton sedangkan luas areal panen ketela pohon mencapai 1.209 Ha dengan menghasilkan produksi ketela pohon sebanyak 14.805 ton.

b. Sektor Perkebunan dan Kehutanan

Hasil perkebunan yang paling potensial di Kabupaten Manokwari antara lain adalah buah-buahan seperti alpokat, mangga, pisang, nangka, dan kelapa sawit. Berikut adalah hasil produksi perkebunan : alpokat 2.604 ton, mangga 2.244 ton, pisang 2.089 ton, nangka 2.156 ton, dan kelapa sawit 123.248,62 ton.

Sedangkan hasil sektor kehutanan antara lain adalah kayu bulat gelondongan yang telah menghasilkan produksi sebanyak 137.872,22 m². Hasil hutan lainnya berupa kayu olahan, seperti kayu gergajian sebanyak 9.465,17 m², chip wood 176.826,81 m², kayu gaharu 270 kg, dan kemedangan 2,58 ton.

c. Sektor Peternakan dan Perikanan

Hasil peternakan yang paling potensial di Kabupaten Manokwari adalah sapi, babi dan kambing. Jumlah populasi dan produksi peternakan adalah sebagai berikut : populasi sapi berjumlah 11.487 ekor dan hasil produksinya 2.859 ekor, babi 21.000 ekordan hasil produksinya 674 ekor, serta kambing 3.744 ekor dan hasil produksinya 120 ekor.

Sedangkan hasil sektor perikanan mencapai 3.823,70 ton, terdiri dari ikan laut 3.823,2 ton dan ikan darat 0,50 ton. jenis ikan laut yang banyak didapat adalah ikan ekor merah, lencam / sikuda, kakap dan tuna, alu-alu, laying dan selar, kuwe, julung-julung, cakalang, tongkol, cumi-cumi, serta udang.

d. Sektor Industri

Pada sektor industri di kabupaten Manokwari juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan lebih optimal. Jenis industri yang paling potensial adalah industri pangan 15 %, sandang dan kulit 7 %, kimia dan bangunan 27 %, dan industri umum / kerajinan 51 %. Adapun jumlah unit industri adalah sebagai berikut : industri garam yodium 1 unit usaha dan menyerap 25 tenaga kerja, udang beku 1 unit usaha dan menyerap 331 tenaga kerja, roti unit usaha 1 dengan 31 tenaga kerja, gula aren 7 unit usaha dengan 21 tenaga kerja, tahu dan tempe 35 unit usaha dengan 35 tenaga kerja, penjahit 63 unit usaha dengan 105 tenaga kerja, dan batako 25 unit usaha dengan 86 tenaga kerja.

e. Sektor Pertambangan

Usaha pengembangan di sektor pertambangan di Kabupaten Manokwari menemui hambatan seperti masih kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Hasil-hasil tambang yang banyak terdapat di Kabupaten Manokwari adalah batu bara, timah hitam, tembaga, perak dan marmer.

f. Pariwisata

Kabupaten Manokwari memiliki sejumlah obyek dan daya tarik wisata terutama wisata alam pantai diantaranya :

- Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (wisata alam laut).
- Danau Anggi (wisata alam / panorama).
- Cagar Alam Arfak, Tamrau Selatan.
- Pulau Mansinam.

g. Sarana Transportasi

Salah satu sarana perhubungan adalah jalan. Panjang jalan Kabupaten 497.200 km², panjang jalan Propinsi 85.700 km² dan panjang jalan Nasional 228.910 km².

E. Pemerintahan

Kabupaten Manokwari dipimpin oleh seorang bupati dan dibantu dengan kepala distrik (Kecamatan), secara administratif pemerintahan Kabupaten Manokwari terdiri dari 17 kecamatan, 11 kelurahan dan 100 desa.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan Yang Sah. Sumber pendapatan asli daerah sendiri mencakup hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan dari penerimaan terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum. Yang dimaksudkan dengan bagian dari pengelolaan sumber daya alam antara lain dari bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan dan perikanan. Pinjaman daerah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Lain-lain penerimaan yang sah terdiri dari penerimaan dari propinsi dan pemerintah pusat.

1. Perbandingan Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Manokwari Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004).

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Manokwari pada tahun anggaran 2001 dan tahun anggaran 2002 digunakan rumus :

a. **Perubahan dalam rupiah (Rp)** $= Y_t - (Y_{(t-1)})$

$$b. \text{Perubahan dalam persentase (\%)} = \frac{Y_t - (Y_{(t-1)})}{Y_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana ;

Y_t = Penerimaan daerah pada masing-masing variabel untuk tahun yang dihitung

Y_{t-1} = Penerimaan daerah pada masing-masing variabel satu tahun sebelum tahun yang dihitung

Tabel 5.1. menunjukkan penerimaan daerah dari tahun anggaran 2001 dan tahun anggaran 2002.

Tabel 5.1.
Data Penerimaan Daerah Sebelum Pemekaran Wilayah
TA. 2001 - 2002
(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	TA. 2001 (Rp)	TA. 2002 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	2.804.183.700	5.228.350.000
2	Dana Perimbangan	232.986.296.786	246.709.829.130
3	Pinjaman PEMDA	0,00	0,00
4	Lain-lain Penerimaan Yang Sah	2.500.000.000	0,00
	JUMLAH	238.290.480.486	251.938.179.130

Sumber data : Kabag Keuangan Pemda Manokwari.

Perhitungan perkembangan penerimaan daerah berdasarkan masing-masing pos penerimaan untuk tahun anggaran 2001 dan 2002 (sebelum pemekaran wilayah) :

a. Pendapatan asli Daerah :

$$\% = \frac{5.228.350.000 - 2.804.183.700}{2.804.183.700} \times 100 \%$$

$$= 86 \%$$

$$\text{Rp} = 5.228.350.000 - 2.804.183.700$$

$$= 2.424.166.300$$

b. Dana Perimbangan :

$$\% = \frac{246.709.829.130 - 232.986.296.786}{232.986.296.786} \times 100 \%$$

$$= 6 \%$$

$$\text{Rp} = 232.986.296.786 - 246.709.829.130$$

$$= 13.723.532.344$$

c. Pinjaman Pemda : 0 % (tidak ada penerimaan)

d. Lain-lain Penerimaan Yang Sah :

$$\% = \frac{0 - 2.500.000.000}{2.500.000.000} \times 100 \%$$

$$= - 100 \%$$

$$\text{Rp} = 0 - 2.500.000.000$$

$$= - 2.500.000.000$$

Tabel 5.2. berikutnya menunjukkan penerimaan daerah Kabupaten Manokwari untuk tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004.

Tabel 5.2.
Data Penerimaan Daerah Setelah Pemekaran Wilayah
TA. 2003 - 2004
(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	TA. 2003 (Rp)	TA. 2004 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	9.843.410.113	8.436.000.000
2	Dana Perimbangan	344.397.951.233	344.377.021.874
3	Pinjaman PEMDA	0,00	0,00
4	Lain-lain Penerimaan Yang Sah	3.000.000.000	9.575.896.000
	JUMLAH	357.241.361.346	362.388.917.874

Sumber data : Kabag Keuangan Pemda Manokwari.

Perhitungan perkembangan penerimaan daerah berdasarkan masing-masing pos penerimaan untuk tahun anggaran 2003 dan 2004 (setelah pemekaran wilayah) :

a. Pendapatan asli Daerah :

$$\% = \frac{8.436.000.000 - 9.843.410.113}{9.843.410.113} \times 100 \%$$

$$= - 14 \%$$

$$\text{Rp} = 8.436.000.000 - 9.843.410.113$$

$$= - 1.407.410.113$$

b. Dana Perimbangan :

$$\% = \frac{344.377.021.874 - 344.397.951.233}{344.397.951.233} \times 100 \%$$

$$= - 0,06 \%$$

$$\text{Rp} = 344.377.021.874 - 344.397.951.233$$

$$= 20.929.359$$

c. Pinjaman Pemda : 0 % (tidak ada penerimaan)

d. Lain-lain Penerimaan Yang Sah :

$$\% = \frac{9.575.896.000 - 3.000.000.000}{3.000.000.000} \times 100 \%$$

$$= 219 \%$$

$$\text{Rp} = 9.575.896.000 - 3.000.000.000$$

$$= 6.575.896.000$$

2. Perbandingan Persentase Anggaran Belanja Pembangunan Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004).

Untuk mengetahui perbandingan persentase anggaran belanja pembangunan sebelum dan setelah pemekaran wilayah, maka digunakan rumus :

Total Belanja Pembangunan

Total APBD

Tabel 5.3. berikutnya menunjukkan data belanja pembangunan dan APBD Kabupaten Manokwari untuk tahun anggaran 2001 – 2004.

Tabel 5.3.
Data Anggaran Belanja Pembangunan dan APBD
T.A. 2001 - 2004
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Total Belanja Pembangunan	Total APBD
2001	122.607.429.650	243.170.208.798
2002	122.924.932.871	274.852.848.130
2003	163.131.855.650	369.179.932.153
2004	111.987.156.800	374.082.833.403

Sumber data : Kantor BAPPEDA Kab. Manokwari.

1. Persentase belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah :

a. Tahun Anggaran 2001 :

- Persentase Belanja Pembangunan terhadap APBD :

$$\begin{aligned}
 & \frac{122.607.429.650}{243.170.208.798} \\
 & = 50,42 \%
 \end{aligned}$$

b. Tahun Anggaran 2002 :

- Persentase Belanja Pembangunan terhadap APBD :

$$\begin{aligned}
 & \frac{122.924.932.871}{274.852.848.130} \\
 & = 44,72 \%
 \end{aligned}$$

2. Persentase belanja pembangunan setelah pemekaran wilayah :

a. Tahun anggaran 2003 :

- Persentase Belanja Pembangunan terhadap APBD :

$$\begin{aligned} &= \frac{163.131.855.650}{369.179.932.153} \\ &= 44,19 \% \end{aligned}$$

b. Tahun Anggaran 2004 :

- Persentase Belanja Pembangunan terhadap APBD :

$$\begin{aligned} &= \frac{111.987.156.800}{374.082.833.403} \\ &= 29,94 \% \end{aligned}$$

3. **Perbandingan Efektivitas Anggaran Belanja Pembangunan Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004).**

Untuk mengetahui perbandingan efektivitas anggaran belanja pembangunan Kabupaten Manokwari sebelum dan setelah pemekaran wilayah, maka digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tabel 5.4. berikutnya menunjukkan data realisasi dan target anggaran belanja pembangunan untuk tahun anggaran 2001.

Tabel 5.4.
Data Realisasi dan Target Anggaran Belanja Pembangunan
Masing-masing Sektor
T.A. 2001

No	Sektor	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
1	Industri	245.000.000	245.000.000
2	Pertanian dan Kehutanan	9.425.930.000	13.800.000.000
3	Sumber Daya Air dan Irigasi	3.105.000.000	5.940.500.000
4	Tenaga Kerja	0,00	0,00
5	Perdagangan dan Koperasi	2.956.000.000	5.956.000.000
6	Transportasi	14.813.000.000	20.897.000.000
7	Pertambangan dan Energi	1.300.000.000	2.450.000.000
8	Pariwisata dan Telekomunikasi	390.000.000	390.000.000
9	Pembangunan Daerah dan Permukiman	7.245.000.000	15.950.000.000
10	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	2.250.000.000	3.650.000.700
11	Pendidikan dan Kebudayaan Nasional	9.953.629.000	13.000.000.000
12	Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00
13	Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	15.961.110.000	17.970.000.000
14	Perumahan dan Pemukiman	26.536.000.000	30.785.000.000
15	Agama	1.950.000.000	1.950.000.000
16	IPTEK	730.000.000	1.250.000.000
17	Hukum	300.000.000	300.000.000
18	Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	24.031.760.650	27.985.760.000
19	Politik, Komunikasi dan Media Daerah	1.085.000.000	1.085.000.000
20	Keamanan dan Ketertiban	330.000.000	330.000.000
	TOTAL	122.607.429.650	163.934.260.700

Sumber data : Kantor BAPPEDA Kab. Manokwari.

➤ Efektivitas anggaran belanja pembangunan untuk tahun anggaran 2001 :

a. Jumlah efektivitas anggaran belanja pembangunan secara keseluruhan :

$$E = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{122.607.429.650}{163.934.260.700} \times 100 \% \\
 &= 74,79 \%
 \end{aligned}$$

b. Jumlah efektivitas anggaran belanja pembangunan berdasarkan masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

- Sektor Industri	$ \begin{aligned} &= \frac{245.000.000}{245.000.000} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned} $
- Sektor Pertanian & Kehutanan	$ \begin{aligned} &= \frac{9.425.930.000}{13.800.000.000} \times 100 \% \\ &= 68,30 \% \end{aligned} $
- Sektor Sumber Daya Air & Irigasi	$ \begin{aligned} &= \frac{3.105.000.000}{5.940.500.000} \times 100 \% \\ &= 52,26 \% \end{aligned} $
- Sektor Tenaga Kerja	$ \begin{aligned} &= 0 \% \end{aligned} $
- Sektor Perdagangan & Koperasi	$ \begin{aligned} &= \frac{2.956.000.000}{5.956.000.000} \times 100 \% \\ &= 49,63 \% \end{aligned} $
- Sektor Transportasi	$ \begin{aligned} &= \frac{14.813.000.000}{20.897.000.000} \times 100 \% \\ &= 70,88 \% \end{aligned} $
- Sektor Pertambangan & Energi	$ \begin{aligned} &= \frac{1.300.000.000}{2.450.000.000} \times 100 \% \end{aligned} $

		= 55,06 %
- Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	$= \frac{390.000.000}{390.000.000} \times 100 \%$	
		= 100 %
- Sektor Pembangunan Daerah	$= \frac{7.245.000.000}{15.950.000.000} \times 100 \%$	
		= 45,42 %
- Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	$= \frac{2.250.000.000}{3.650.000.000} \times 100 \%$	
		= 39,82 %
- Sektor Pendidikan & Kebudayaan	$= \frac{9.953.629.000}{13.000.000.000} \times 100 \%$	
		= 76,57 %
- Sektor Kependudukan & Kesra		= 0 %
- Sektor Kesehatan & Kesejahteraan Sosial	$= \frac{15.961.110.000}{17.970.000.000} \times 100 \%$	
		= 88,82 %
- Sektor Perumahan & Pemukiman	$= \frac{26.536.000.000}{30.785.000.000} \times 100 \%$	
		= 86,19 %
- Sektor Agama	$= \frac{1.950.000.000}{1.950.000.000} \times 100 \%$	
		= 100 %

- Sektor IPTEK	$= \frac{730.000.000}{1.250.000.000} \times 100 \%$
	$= 58,40 \%$
- Sektor Hukum	$= \frac{300.000.000}{300.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Aparatur Pemerintah	$= \frac{24.031.760.650}{27.985.760.000} \times 100 \%$
	$= 85,87 \%$
- Sektor Politik, Komunikasi & Media	$= \frac{1.085.000.000}{1.085.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Keamanan & Ketertiban	$= \frac{330.000.000}{330.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$

Tabel 5.5. berikutnya menunjukkan data realisasi dan target anggaran belanja pembangunan masing-masing sektor untuk tahun anggaran 2002.

Tabel 5.5.
Data Realisasi dan Target Anggaran Belanja Pembangunan
Masing-masing Sektor
T.A. 2002

No	Sektor	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
1	Industri	195.000.000	395.000.000
2	Pertanian dan Kehutanan	9.787.557.400	16.110.357.400
3	Sumber Daya Air dan Irigasi	1.860.676.900	2.250.676.900
4	Tenaga Kerja	150.000.000	175.000.000
5	Perdagangan dan Koperasi	5.950.000.000	6.790.000.000
6	Transportasi	17.290.541.871	28.490.541.871
7	Pertambangan dan Energi	1.700.000.000	1.700.000.000
8	Pariwisata dan Telekomunikasi	446.150.000	446.150.000
9	Pembangunan Daerah dan Permukiman	8.190.000.000	21.330.000.000
10	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	12.589.669.000	13.983.377.000
11	Pendidikan dan Kebudayaan Nasional	6.654.751.000	16.111.372.000
12	Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00
13	Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	13.277.592.000	21.386.268.000
14	Perumahan dan Pemukiman	22.781.638.500	30.729.005.500
15	Agama	1.650.000.000	2.065.000.000
16	IPTEK	755.000.000	955.000.000
17	Hukum	300.000.000	300.000.000
18	Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	18.546.356.200	24.322.900.200
19	Politik, Komunikasi dan Media Daerah	550.000.000	550.000.000
20	Keamanan dan Ketertiban	250.000.000	250.000.000
	TOTAL	122.924.932.871	188.741.087.871

Sumber data : Kantor BAPPEDA Kab. Manokwari.

➤ Efektivitas anggaran belanja pembangunan untuk tahun anggaran 2002 :

a. Jumlah efektivitas anggaran belanja pembangunan secara keseluruhan :

$$E = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{122.924.932.871}{188.741.087.871} \times 100 \% \\
 & = 65,13 \%
 \end{aligned}$$

b. Jumlah efektivitas anggaran belanja pembangunan berdasarkan masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

- Sektor Industri	$ \begin{aligned} & \frac{195.000.000}{395.000.000} \times 100 \% \\ & = 49,36 \% \end{aligned} $
- Sektor Pertanian & Kehutanan	$ \begin{aligned} & \frac{9.787.557.400}{16.110.357.400} \times 100 \% \\ & = 60,75 \% \end{aligned} $
- Sektor Sumber Daya Air & Irigasi	$ \begin{aligned} & \frac{1.860.676.900}{2.250.676.900} \times 100 \% \\ & = 82,67 \% \end{aligned} $
- Sektor Tenaga Kerja	$ \begin{aligned} & \frac{150.000.000}{175.000.000} \times 100 \% \\ & = 85,71 \% \end{aligned} $
- Sektor Perdagangan & Koperasi	$ \begin{aligned} & \frac{5.950.000.000}{6.790.000.000} \times 100 \% \\ & = 87,63 \% \end{aligned} $
- Sektor Transportasi	$ \begin{aligned} & \frac{17.290.541.871}{28.490.541.871} \times 100 \% \\ & = 60,69 \% \end{aligned} $

- Sektor Pertambangan & Energi	$= \frac{1.700.000.000}{1.700.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	$= \frac{446.000.000}{446.150.000} \times 100 \%$
	$= 99,97 \%$
- Sektor Pembangunan Daerah	$= \frac{8.190.000.000}{21.330.000.000} \times 100 \%$
	$= 38,41 \%$
- Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	$= \frac{12.589.669.000}{13.983.377.000} \times 100 \%$
	$= 90,03 \%$
- Sektor Pendidikan & Kebudayaan	$= \frac{11.527.000.000}{23.118.140.200} \times 100 \%$
	$= 49,86 \%$
- Sektor Kependudukan & Kesra	$= 0 \%$
- Sektor Kesehatan & Kesejahteraan Sosial	$= \frac{13.277.592.000}{21.386.268.000} \times 100 \%$
	$= 62,08 \%$
- Sektor Perumahan & Pemukiman	$= \frac{22.781.638.500}{30.729.005.500} \times 100 \%$
	$= 74,14 \%$

- Sektor Agama	$= \frac{1.650.000.000}{2.065.000.000} \times 100 \%$
	$= 62,26 \%$
- Sektor IPTEK	$= \frac{755.000.000}{955.000.000} \times 100 \%$
	$= 75,50 \%$
- Sektor Hukum	$= \frac{300.000.000}{300.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Aparatur Pemerintah	$= \frac{18.546.356.200}{24.322.900.200} \times 100 \%$
	$= 76,25 \%$
- Sektor Politik, Komunikasi & Media	$= \frac{550.000.000}{550.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Keamanan & Ketertiban	$= \frac{250.000.000}{250.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$

Tabel 5.6. berikutnya menunjukkan data realisasi dan target anggaran belanja pembangunan masing-masing sektor tahun anggaran 2003.

Tabel 5.6.
Data Realisasi dan Target Anggaran Belanja Pembangunan
Masing-masing Sektor
T.A. 2003

No	Sektor	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
1	Industri	150.000.000	350.000.000
2	Pertanian dan Kehutanan	6.133.451.200	11.138.451.200
3	Sumber Daya Air dan Irigasi	2.075.000.000	4.100.000.000
4	Tenaga Kerja	300.000.000	375.000.000
5	Perdagangan dan Koperasi	7.355.000.000	8.005.000.000
6	Transportasi	35.544.637.500	50.307.137.500
7	Pertambangan dan Energi	1.000.000.000	1.000.000.000
8	Pariwisata dan Telekomunikasi	770.000.000	770.000.000
9	Pembangunan Daerah dan Permukiman	13.620.000.000	13.670.000.000
10	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	11.541.135.000	13.958.965.000
11	Pendidikan dan Kebudayaan Nasional	11.527.000.000	23.118.140.200
12	Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	300.000.000	300.000.000
13	Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	21.575.300.000	29.943.127.000
14	Perumahan dan Pemukiman	13.301.194.950	13.301.194.950
15	Agama	3.570.000.000	4.770.000.000
16	IPTEK	1.000.000.000	1.203.800.000
17	Hukum	265.437.000	265.437.000
18	Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	19.183.700.000	21.539.700.000
19	Politik, Komunikasi dan Media Daerah	1.505.000.000	1.505.000.000
20	Keamanan dan Ketertiban	415.000.000	477.000.000
21	Bantuan Daerah Bawahan	12.000.000.000	13.300.000.000
	TOTAL	163.131.855.650	213.397.952.850

Sumber data : Kantor BAPPEDA Kab. Manokwari

- Efektivitas anggaran belanja pembangunan untuk tahun anggaran 2003 :
 - a. Jumlah efektivitas anggaran belanja pembangunan secara keseluruhan :

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{163.131.855.650}{213.397.952.850} \times 100 \% \\
 &= 76,44 \%
 \end{aligned}$$

b. Jumlah efektivitas anggaran belanja pembangunan berdasarkan masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

- Sektor Industri	$ \begin{aligned} &= \frac{150.000.000}{350.000.000} \times 100 \% \\ &= 42,86 \% \end{aligned} $
- Sektor Pertanian & Kehutanan	$ \begin{aligned} &= \frac{6.133.451.200}{11.138.451.200} \times 100 \% \\ &= 55,06 \% \end{aligned} $
- Sektor Sumber Daya Air & Irigasi	$ \begin{aligned} &= \frac{2.075.000.000}{4.100.000.000} \times 100 \% \\ &= 50,61 \% \end{aligned} $
- Sektor Tenaga Kerja	$ \begin{aligned} &= \frac{300.000.000}{375.000.000} \times 100 \% \\ &= 55,06 \% \end{aligned} $
- Sektor Perdagangan & Koperasi	$ \begin{aligned} &= \frac{7.355.000.000}{8.005.000.000} \times 100 \% \\ &= 91,88 \% \end{aligned} $

- Sektor Transportasi	$= \frac{35.544.637.500}{50.307.137.500} \times 100 \%$
	$= 70,65 \%$
- Sektor Pertambangan & Energi	$= \frac{1.000.000.000}{1.000.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	$= \frac{70.000.000}{770.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Pembangunan Daerah	$= \frac{13.620.000.000}{13.570.000.000} \times 100 \%$
	$= 99,63 \%$
- Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	$= \frac{11.541.135.000}{13.958.965.000} \times 100 \%$
	$= 82,68 \%$
- Sektor Pendidikan & Kebudayaan	$= \frac{11.527.000.000}{23.118.140.200} \times 100 \%$
	$= 49,86 \%$
- Sektor Kependudukan & Kesra	$= \frac{300.000.000}{300.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Kesehatan & Kesejahteraan Sosial	$= \frac{21.575.300.000}{29.943.127.000} \times 100 \%$

	= 72,05 %
- Sektor Perumahan & Pemukiman	$= \frac{13.301.194.950}{13.301.194.950} \times 100 \%$
	= 100 %
- Sektor Agama	$= \frac{3.570.000.000}{4.770.000.000} \times 100 \%$
	= 74,84 %
- Sektor IPTEK	$= \frac{1.000.000.000}{1.203.800.000} \times 100 \%$
	= 83,07 %
- Sektor Hukum	$= \frac{265.437.000}{265.437.000} \times 100 \%$
	= 100 %
- Sektor Aparatur Pemerintah	$= \frac{19.183.700.000}{21.539.700.000} \times 100 \%$
	= 89,06 %
- Sektor Politik, Komunikasi & Media	$= \frac{1.505.000.000}{1.505.000.000} \times 100 \%$
	= 100 %
- Sektor Keamanan & Ketertiban	$= \frac{415.000.000}{477.000.000} \times 100 \%$
	= 87,00 %

- Sektor Bantuan Daerah Bawahan	$= \frac{12.000.000.000}{13.300.000.000} \times 100 \%$ $= 90,22 \%$
---------------------------------	--

Tabel 5.7. berikutnya menunjukkan data realisasi dan target anggaran belanja pembangunan masing-masing sektor tahun anggaran 2004.

Tabel.5.7.
Data Realisasi dan Target Anggaran Belanja Pembangunan
Masing-masing Sektor
T.A. 2004

No	Sektor	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
1	Industri	0,00	0,00
2	Pertanian dan Kehutanan	7.470.455.000	8.635.455.000
3	Sumber Daya Air dan Irigasi	4.456.583.300	4.456.583.300
4	Tenaga Kerja	300.000.000	300.000.000
5	Perdagangan dan Koperasi	3.670.000.000	3.970.000.000
6	Transportasi	22.234.966.500	23.234.966.500
7	Pertambangan dan Energi	270.000.000	385.000.000
8	Pariwisata dan Telekomunikasi	0,00	160.300.000
9	Pembangunan Daerah dan Permukiman	9.190.000.000	9.940.000.000
10	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	3.200.000.000	6.602.969.000
11	Pendidikan dan Kebudayaan Nasional	15.920.000.000	29.319.700.000
12	Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	150.000.000	150.000.000
13	Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	15.959.051.000	20.959.051.000
14	Perumahan dan Pemukiman	11.583.341.000	11.583.341.000
15	Agama	4.200.000.000	5.440.000.000
16	IPTEK	363.000.000	363.000.000
17	Hukum	100.000.000	100.000.000
18	Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	12.394.760.000	14.929.760.000
19	Politik, Komunikasi dan Media Daerah	325.000.000	355.000.000
20	Keamanan dan Ketertiban	200.000.000	200.000.000
21	Bantuan Daerah Bawahan	0,00	0,00
	TOTAL	111.987.156.800	141.085.125.800

Sumber data : Kantor BAPPEDA Kab. Manokwari.

- Efektivitas anggaran belanja pembangunan untuk tahun anggaran 2004 :
- a. Jumlah efektivitas anggaran belanja pembangunan secara keseluruhan :

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{111.987.156.800}{141.085.125.800} \times 100 \% \\
 &= 79,37 \%
 \end{aligned}$$

b. Jumlah efektivitas anggaran belanja pembangunan berdasarkan masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

- Sektor Industri	= 0 %
- Sektor Pertanian & Kehutanan	$= \frac{7.470.455.000}{8.635.455.000} \times 100 \%$ = 86,51 %
- Sektor Sumber Daya Air & Irigasi	$= \frac{4.456.583.300}{4.456.583.300} \times 100 \%$ = 100 %
- Sektor Tenaga Kerja	$= \frac{300.000.000}{375.000.000} \times 100 \%$ = 55,06 %
- Sektor Perdagangan & Koperasi	$= \frac{7.355.000.000}{8.005.000.000} \times 100 \%$ = 91,88 %
- Sektor Transportasi	$= \frac{22.234.966.500}{23.234.966.500} \times 100 \%$ = 92,44 %



- Sektor Pertambangan & Energi	$= \frac{270.000.000}{385.000.000} \times 100 \%$
	$= 70,13 \%$
- Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	$= 0 \%$
- Sektor Pembangunan Daerah	$= \frac{9.190.000.000}{9.940.000.000} \times 100 \%$
	$= 92,45 \%$
- Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	$= \frac{3.200.000.000}{6.602.969.000} \times 100 \%$
	$= 48,46 \%$
- Sektor Pendidikan & Kebudayaan	$= \frac{15.920.000.000}{29.319.700.000} \times 100 \%$
	$= 54,31 \%$
- Sektor Kependudukan & Kesra	$= \frac{150.000.000}{150.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Kesehatan & Kesejahteraan Sosial	$= \frac{15.959.051.000}{20.959.051.000} \times 100 \%$
	$= 76,14 \%$
- Sektor Perumahan & Pemukiman	$= \frac{11.583.341.000}{11.583.341.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$

- Sektor Agama	$= \frac{4.200.000.000}{5.440.000.000} \times 100 \%$
	$= 77,20 \%$
- Sektor IPTEK	$= \frac{363.000.000}{363.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Hukum	$= \frac{1.000.000.000}{1.000.000.000} \times 100 \%$
	$= 100 \%$
- Sektor Aparatur Pemerintah	$= \frac{12.394.760.000}{14.929.760.000} \times 100 \%$
	$= 83,02 \%$
- Sektor Politik, Komunikasi & Media	$= \frac{325.000.000}{355.000.000} \times 100 \%$
	$= 91,55 \%$
- Sektor Keamanan & Ketertiban	$= \frac{200.000.000}{200.000.000} \times 100 \%$
	$= 100,00 \%$
- Sektor Bantuan Daerah Bawahan	$= 0 \%$

B. Pembahasan

1. Perbandingan Perkembangan Penerimaan Daerah Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004).

Tabel 5.8.
Perbandingan Penerimaan Daerah
Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah
T.A. 2001 - 2004

Jenis Penerimaan	Kenaikan / Penurunan			
	T.A. 2001 - 2002		T.A. 2003 - 2004	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	2.424.166.300	86	- 1.407.410.113	- 14
Dana Perimbangan	13.723.532.344	6	- 20.929.359	- 0,06
Pinjaman PEMDA	0,00	0	0,00	0
Lain-lain Penerimaan Yang Sah	- 2.500.000.000	- 100	6.575.896.000	219
Jumlah	13.647.698.644	6	7.962.376.754	1

Sumber : Kabag Keuangan Pemda Manokwari (data diolah).

Dari tabel 5.7. diatas dapat terlihat bagaimana perbandingan penerimaan daerah sebelum pemekaran wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003 – 2004). Jumlah total penerimaan daerah sebelum pemekaran wilayah meningkat sebesar Rp.13.647.698.644 atau sekitar 6 %, peningkatan ini berasal dari naiknya penerimaan dari PAD dan Dana Perimbangan, sedangkan Lain-lain Penerimaan yang Sah menurun. Sementara penerimaan daerah setelah pemekaran wilayah hanya meningkat

sebesar Rp.7.962.376.754 atau sekitar 1 %, ini disebabkan menurunnya penerimaan dari PAD, dan Dana Perimbangan.

1. Sebelum Pemekaran Wilayah (tahun anggaran 2001 – 2002)
 - a. Penerimaan pendapatan asli daerah T.A. 2002 meningkat sebesar Rp.2.424.166.300 atau sekitar 86 % dibanding pada T.A. 2001. Peningkatan penerimaan ini berasal dari beberapa sektor seperti pajak daerah sebesar Rp.132.500.000, bagian laba usaha daerah sebesar Rp.825.000.000, serta dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.1.620.816.300. Sedangkan dari retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp.154.150.000.
 - b. Penerimaan dana perimbangan T.A. 2002 meningkat sebesar Rp.13.723.532.344 atau sekitar 6 % dibanding pada T.A. 2001. Peningkatan penerimaan ini berasal dari semua sektor dana perimbangan seperti bagi hasil pajak Rp.10.562.981.130, bagi hasil bukan pajak Rp.3.158.201.214 dan dana alokasi umum Rp.2.350.000.
 - c. Penerimaan dari pinjaman PEMDA tidak ada.
 - d. Lain-lain penerimaan yang sah pada T.A. 2002 menurun sebesar Rp.2.500.000.000 atau sekitar 100 % dibanding penerimaan pada T.A. 2001.
2. Setelah Pemekaran Wilayah (tahun anggaran 2003 – 2004)
 - a. Penerimaan pendapatan asli daerah T.A. 2004 menurun sebesar Rp.1.407.410.113 atau sebesar - 14 % dibanding pada T.A. 2003. Penurunan ini disebabkan karena penerimaan dari sektor lain-lain

pendapatan menurun sebesar Rp.2.913.410.113, sedangkan penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba usaha daerah naik hanya sebesar Rp.1.506.000.000.

- b. Penerimaan dana perimbangan T.A. 2004 menurun sebesar Rp.20.929.359 atau sekitar 0,06 % dibanding pada T.A. 2003. Walaupun ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan seperti bagi hasil pajak, dana alokasi khusus, dan dana alokasi non DR sebesar Rp.45.273.570.641. Tetapi beberapa sektor mengalami penurunan sangat besar seperti bagi hasil bukan pajak, DAU, dan dana penyeimbang sebesar Rp.55.294.500.000, sehingga terjadi penurunan penerimaan.
- c. Penerimaan dari pinjaman PEMDA tidak ada.
- d. Lain-lain penerimaan yang sah T.A. 2004 meningkat sebesar Rp.6.575.896.000 atau sekitar 219 % dibanding pada T.A. 2003, yang berasal dari pemerintah pusat dan propinsi.

2. Perbandingan Persentase Anggaran Belanja Pembangunan Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004).

Tabel 5.9. berikutnya menunjukkan perbandingan persentase belanja pembangunan terhadap APBD.

Tabel 5.9.
Perbandingan Persentase Anggaran Belanja Pembangunan
Terhadap Total APBD
T.A. 2001 – 2004

Tahun Anggaran	Persentase Belanja Pembangunan (%)	Keterangan
2001	50,42	Sebelum Pemekaran Wilayah
2002	44,72	
2003	44,19	Setelah Pemekaran Wilayah
2004	29,94	

Sumber : Kantor BAPPEDA Kab. Manokwari (data diolah).

Dari tabel 5.9. diatas terlihat bahwa persentase belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah (T.A. 2001 – 2002) lebih besar yaitu sebesar 50,42 % dan 44,72 % dibandingkan dengan persentase setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003 – 2004) yang hanya sebesar 44,19 % dan 29,94 %. Persentase anggaran belanja pembangunan setelah pemekaran wilayah menjadi lebih kecil dibanding sebelum pemekaran wilayah disebabkan karena anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan untuk T.A. 2003 – 2004 khusus hanya untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di pemerintah Kabupaten Manokwari saja dan anggaran belanja pembangunan yang ada disesuaikan juga dengan kebutuhan belanja pembangunan bagi wilayah yang ada di Kabupaten Manokwari tersebut. Sedangkan untuk dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama setelah pemekaran wilayah, saat ini masing-masing mempunyai anggaran belanja pembangunan yang terpisah dari Kabupaten Manokwari yang digunakan untuk membiayai

kegiatan pembangunan di kedua kabupaten tersebut. Sedangkan persentase anggaran belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah lebih besar dibandingkan setelah pemekaran wilayah karena seluruh anggaran belanja pembangunan dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Manokwari yang didalamnya termasuk wilayah Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni.

3. Perbandingan Efektivitas Anggaran Belanja Pembangunan Sebelum Pemekaran Wilayah (T.A. 2001 – 2002) dan Setelah Pemekaran Wilayah (T.A. 2003 – 2004).

Tabel 5.10. dibawah ini menunjukkan perbandingan efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

Tabel 5.10.
Perbandingan Efektivitas Anggaran Belanja Pembangunan
Masing-masing Sektor
T.A. 2001 – 2004

Tahun Anggaran	Efektivitas Belanja Pembangunan (%)	Keterangan
2001	74,79	Sebelum Pemekaran Wilayah
2002	65,13	
2003	76,44	Setelah Pemekaran Wilayah
2004	79,37	

Sumber : Kantor BAPPEDA Kab. Manokwari (data diolah).

Dari tabel 5.10. diatas terlihat bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah yang diperoleh cenderung

menurun tiap tahun anggaran dari sebesar 74,79 % menjadi 65,13 %, sedangkan tingkat efektivitas setelah pemekaran wilayah yang diperoleh cenderung semakin meningkat tiap tahun anggaran dari 76,44 % menjadi 79,37 %. Semakin meningkatnya tingkat efektivitas anggaran belanja pembangunan setelah pemekaran wilayah (T.A. 2003 – 2004) disebabkan karena anggaran belanja pembangunan yang direalisasikan untuk masing-masing sektor pembangunan semakin baik seperti sektor sumber daya air dan irigasi, sektor transportasi, sektor pembangunan daerah, serta sektor perumahan dan permukiman yang tingkat efektivitasnya diperoleh sebesar 90 % - 100 % yang berarti cukup efektif. Dibandingkan dengan sebelum pemekaran wilayah sektor sumber daya air dan irigasi, sektor transportasi, sektor pembangunan daerah, serta sektor perumahan dan permukiman hanya diperoleh sebesar 60 % - 80 % yang berarti kurang efektif. Dan juga setelah pemekaran wilayah ini anggaran belanja pembangunan lebih besar digunakan oleh Kabupaten Manokwari dalam membiayai penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Sedangkan perbandingan efektivitas anggaran belanja pembangunan untuk tiga belas sektor pembangunan lainnya, setelah pemekaran wilayah diperoleh sebesar 60 % - 80 % yang berarti kurang efektif sedangkan tiga belas sektor yang sama sebelum pemekaran wilayah diperoleh hanya sebesar kurang dari 60 % yang berarti tidak efektif. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat efektivitas anggaran belanja pembangunan setelah pemekaran wilayah lebih

tinggi bila dibandingkan dengan tingkat efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan masalah sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran wilayah (TA. 2001 - 2002) meningkat sebesar Rp.13.647.698.644 atau sekitar 6 % yang berasal dari kenaikan PAD sebesar Rp.2.424.166.300, Dana Perimbangan sebesar Rp.13.723.532.344, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah tidak ada. Perkembangan penerimaan daerah setelah pemekaran wilayah (TA. 2003 - 2004) meningkat hanya sebesar Rp.7.962.376.754 atau sekitar 1 % ini terjadi karena penerimaan dari PAD menurun sebesar Rp.1.407.410.113 dan Dana Perimbangan sebesar Rp.20.929.359 sedangkan penerimaan dari Lain-lain Penerimaan yang Sah meningkat hanya sebesar Rp.6.575.896.000. Perkembangan penerimaan daerah sebelum pemekaran wilayah meningkat dibandingkan setelah pemekaran wilayah.
2. Persentase anggaran belanja pembangunan terhadap APBD sebelum pemekaran wilayah (TA. 2001 - 2002) lebih besar dibandingkan persentase anggaran belanja pembangunan setelah pemekaran wilayah (TA. 2003 - 2004). Sebelum pemekaran wilayah persentasenya adalah sebesar 50,42 % dan 44,72 % sedangkan setelah pemekaran wilayah hanya sebesar 44,19 % dan 29,94 %.

3. Efektivitas anggaran belanja pembangunan sebelum pemekaran wilayah (TA. 2001 – 2002) yang diperoleh cenderung menurun yaitu dari 74,79 % menjadi 65,13 % sedangkan setelah pemekaran wilayah efektivitas yang diperoleh cenderung meningkat yaitu dari 76,44 % menjadi 79,37 %. Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas setelah pemekaran wilayah lebih baik dibandingkan dengan tingkat efektivitas sebelum pemekaran wilayah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Data-data penerimaan daerah yang diperoleh dan diteliti oleh penulis masih kurang lengkap untuk dapat menjawab permasalahan dengan baik yang diangkat oleh penulis mengenai besarnya penerimaan daerah setelah pemekaran wilayah.
2. Dalam melakukan perbandingan data sebelum pemekaran wilayah dengan setelah pemekaran wilayah penulis hanya melihat pada perubahan jumlah angka-angka yang ada dalam data tersebut. Sehingga kesimpulan yang diambil penulis sesuai dengan perubahan data yang ada.

C. Saran

1. Data yang diperlukan dalam penelitian ini masih kurang lengkap sehingga penulis belum dapat menjawab permasalahan dengan baik, maka bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama sebaiknya menambah lagi data penerimaan daerah sehingga lebih baik lagi hasil penelitian yang dilakukan.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan data sebelum dan setelah pemekaran wilayah Kabupaten Manokwari sebaiknya juga perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan angka-angka dalam data tersebut sehingga lebih dapat diketahui apa saja penyebabnya sehingga hasil penelitian yang diperoleh semakin lengkap.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Devas, Nick dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI
- Dimas. 2003. *Pemekaran Papua*. Jakarta: Tempo
- Djopari, JRG. 2003. *Pemekaran Papua Positif bagi Rakyat Papua*. Jakarta: Sinar Harapan
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- . 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi
- Munir, Dasrii H. dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Peraturan Pemerintah R.I. no. 129 Thn 2000. *tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*. Jakarta: Cides.
- Sumule, Agus. 2003. *Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryaningtyas, Toto. 2003. *Pemekaran Papua, Tak Semudah Menggurat Paraf*. Jakarta: Kompas
- Undang-Undang No.25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah*.
- Undang-Undang No.26 Tahun 2002. *Tentang Pembentukan 14 Kabupaten Baru di Provinsi Papua*.

Lampiran

Lampiran 1

Jumlah Penerimaan Daerah dan APBD Kabupaten Manokwari
T.A. 2001

No	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu	Rp. 4.879.728.312,00
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) :	Rp. 2.804.183.700,00
	• Pos Pajak Daerah	245.000.000,00
	• Pos Retribusi Daerah	850.000.000,00
	• Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	375.000.000,00
	• Pos Lain-lain pendapatan	1.334.183.700,00
3	Dana Perimbangan :	Rp. 232.986.296.786,00
	• Bagi Hasil pajak	23.500.000.000,00
	• Bagi Hasil Bukan Pajak	5.638.646.786,00
	• Dana Alokasi Umum (DAU)	203.847.650.000,00
	• Dana Penyeimbang	0,00
	• Dana Alokasi Khusus	0,00
	• Dana Otonomi Khusus (OTSUS)	0,00
4	Pinjaman Pemerintah Daerah :	Rp. 0,00
	• Pos Pinjaman Daerah	0,00
	• Pos Pinjaman Luar Negeri	0,00
5	Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	Rp. 2.500.000.000,00
	• Penerimaan dari Provinsi	2.500.000.000,00
	• Penerimaan dari Pusat	0,00
	Jumlah	Rp. 243.170.208.798,00

Lampiran 2

Jumlah Penerimaan Daerah dan APBD Kabupaten Manokwari
T.A. 2002

No	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu	Rp. 22.914.669.000,00
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) : <ul style="list-style-type: none"> • Pos Pajak Daerah • Pos Retribusi Daerah • Pos Laba Perusahaan Milik Daerah • Pos Lain-lain pendapatan 	Rp. 5.228.350.000,00 377.500.000,00 695.850.000,00 1.200.000.000,00 2.955.000.000,00
3	Dana Perimbangan : <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil pajak • Bagi Hasil Bukan Pajak • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Penyeimbang • Dana Alokasi Khusus • Dana Otonomi Khusus (OTSUS) 	Rp. 246.709.829.130,00 34.062.981.130,00 8.796.848.000,00 203.850.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4	Pinjaman Pemerintah Daerah : <ul style="list-style-type: none"> • Pos Pinjaman Daerah • Pos Pinjaman Luar Negeri 	Rp. 0,00 0,00 0,00
5	Lain-lain Penerimaan Yang Sah : <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dari Provinsi • Penerimaan dari Pusat 	Rp. 0,00 0,00 0,00
	Jumlah	Rp. 274.852.848.130,00

Lampiran 3

Jumlah Penerimaan Daerah dan APBD Kabupaten Manokwari
T.A. 2003

No	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu	Rp. 11.938.570.807,00
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) : <ul style="list-style-type: none"> • Pos Pajak Daerah • Pos Retribusi Daerah • Pos Laba Perusahaan Milik Daerah • Pos Lain-lain pendapatan 	Rp. 9.843.410.113 650.000.000,00 1.075.000.000,00 1.150.000.000,00 6.968.410.113,00
3	Dana Perimbangan : <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil pajak • Bagi Hasil Bukan Pajak • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Penyeimbang • Dana Otonomi Khusus (OTSUS) • Dana Alokasi Khusus Non DR 	Rp. 344.397.951.233,00 46.980.451.233,00 10.569.500.000,00 247.190.000.000,00 9.058.000.000,00 25.000.000.000,00 5.600.000.000,00
4	Pinjaman Pemerintah Daerah : <ul style="list-style-type: none"> • Pos Pinjaman Daerah • Pos Pinjaman Luar Negeri 	Rp. 0,00 0,00 0,00
5	Lain-lain Penerimaan Yang Sah : <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dari Provinsi • Penerimaan dari Pusat 	Rp. 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
	Jumlah	Rp. 369.179.932.153,00

Lampiran 4

**Jumlah Penerimaan Daerah dan APBD Kabupaten Manokwari
T.A. 2004**

No	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu	Rp. 11.693.915.529,07
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) :	Rp. 8.436.000.000,00
	• Pos Pajak Daerah	820.000.000,00
	• Pos Retribusi Daerah	1.361.000.000,00
	• Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	2.200.000.000,00
	• Pos Lain-lain pendapatan	4.055.000.000,00
3	Dana Perimbangan :	Rp. 344.377.021.874,00
	• Bagi Hasil pajak	55.213.141.874,00
	• Bagi Hasil Bukan Pajak	7.995.000.000,00
	• Dana Alokasi Umum (DAU)	195.306.000.000,00
	• Dana Penyeimbang	8.222.000.000,00
	• Dana Otonomi Khusus (OTSUS)	65.680.880.000,00
	• Dana Alokasi Khusus Non DR	11.960.000.000,00
4	Pinjaman Pemerintah Daerah :	Rp. 0,00
	• Pos Pinjaman Daerah	0,00
	• Pos Pinjaman Luar Negeri	0,00
5	Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	Rp. 9.575.896.000,00
	• Penerimaan dari Provinsi	7.800.000.000,00
	• Penerimaan dari Pusat	1.775.896.000,00
	Jumlah	Rp. 374.082.833.403,07



BUPATI MANOKWARI

Alamat : Jln. Sujarwo Condronegoro. SH

Telepon : (0986) 211945

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/104

Dengan ini Bupati Manokwari menerangkan bahwa :

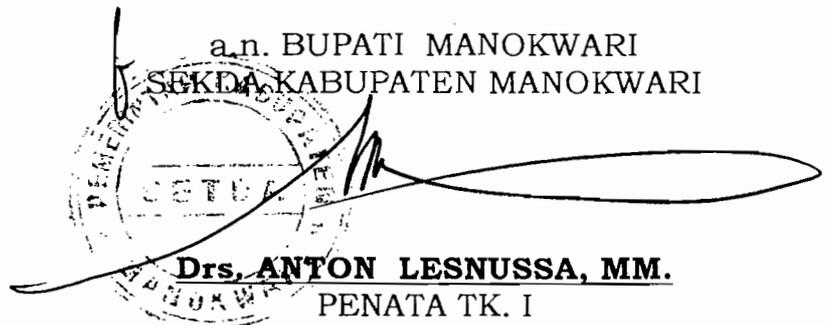
Nama : STEVENT MIKA
No. Mahasiswa : 992114205
Universitas : Sanata Dharma Yogyakarta
Alamat Rumah : Perum. Permatasari no.34 Condong Catur
Yogyakarta.

telah mengadakan penelitian dengan judul "Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Penerimaan Daerah' pada Kantor Bupati Kabupaten Manokwari dari tanggal 10 Januari 2005 sampai dengan 11 Pebruari 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 14 Pebruari 2005.

a.n. BUPATI MANOKWARI
SEKDA KABUPATEN MANOKWARI



Drs. ANTON LESNUSSA, MM.

PENATA TK. I

NIP. 010081927

